

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di kepulauan Flores Nusa Tenggara Timur. Ibu Kota Kabupaten Manggarai adalah Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong dengan luas wilayah 2.096,44 km² dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 325.530 jiwa. Secara astronomis, Kabupaten Manggarai terletak di antara 08°14'27,32" hingga 08°54'57,17" Lintang Selatan dan 120°13'41,34" hingga 120°32'47,22" Bujur Timur. Wilayah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan Laut Flores, timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur, selatan berbatasan dengan Laut Sawu, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Manggarai memiliki hak dalam mengatur daerahnya sendiri termasuk infrastruktur. Namun dapat dilihat infrastruktur Kabupaten Manggarai, khususnya infrastruktur bangunan perkantoran kurang memadai kebutuhan penggunaannya. Hal ini dikarenakan fokus pembangunan pemerintah pada infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan dan jembatan antara desa. Oleh karena itu perlu dilakukan satu upaya untuk mencapai infrastruktur bangunan yang baik. salah satu gedung kantor yang perlu dimaksimalkan penataannya adalah gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR). Sebagai pihak yang mampu bertanggung jawab atas segala pembangunan dalam wilayah yang mencakup satu Kabupaten, maka sudah sepantasnya gedung kantor dinas PUPR harus mewedahi secara maksimal civitas di dalamnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki struktur organisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian, masing-masing fokus pada bidang keahlian tertentu. Secara keseluruhan, Dinas PUPR memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Bangunan dan Tata

Ruang, Perumahan, Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Dinas PUPR juga memiliki Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, Dinas PUPR di tingkat kabupaten memegang peranan vital dalam mendorong kemajuan dan pengembangan wilayah.

Meskipun Kabupaten Manggarai sudah memiliki gedung kantor Dinas PUPR namun belum mewadahi secara maksimal civitas di dalamnya, dimana kurangnya ruang dan fasilitas dari tiap bidang kepengurusan di dalamnya. Oleh karena perlu adanya penataan ulang kantor dinas PUPR Kabupaten Manggarai dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Modern. Prinsip arsitektur modern yang mengutamakan fungsi, namun tetap memiliki nilai estetika dari penggunaan material, minimal dan assimetris dianggap paling baik dalam perencanaan bangunan formal seperti kantor dinas, selain itu dengan mengutamakan fungsi maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ruang civitas seseuai bidang pekerjaannya masing-masing yang tersusun secara hirarki.

Sebuah bangunan yang memiliki bentuk dan tampilan harus bisa menggambarkan suatu wujud dari kantor itu sendiri. Dengan menghadirkan desain arsitektur modern pada banguna PUPR Kabupaten Manggarai dengan menerapkan konsep kesederhanaan bentuk bangunan yang mengikuti perkembangan dari masa ke masa.

Arsitektur Modern merupakan suatu pendekatan yang akan diterapkan pada perancangan Gedung Dinas PUPR Kabupaten Manggarai. Diterapkannya Arsitektur Modern pada Gedung Dinas PUPR Kabupaten Manggarai agar dapat mempengaruhi kehidupan Masyarakat sehingga menjadi salah satu tuntutan yang mendorong perubahan. Perubahan ini merupakan perubahan dari fisik bangunan dari segi tampilan, penggunaan material, struktur dan konstruksi. Selain itu juga bangunan tidak hanya mementingkan nilai estetika dan tampilannya saja namun tetap membuat bangunan yang mengacu pada banguna kantor PUPR yang memili standarnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana mengatur organisasi ruang dan fungsi-fungsi tersebut secara baik, agar kantor tersebut menjadi tempat bekerja yang nyaman dan aman.
- 1.2.2 Bagaimana menata sistem struktur dan utilitas bangunan yang mampu memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna bangunan
- 1.2.3 Bagaimana mendesain sebuah kantor tersebut sedemikian rupa sehingga bisa mereduksi sedapat mungkin dampak lingkungan dengann menggunakan pendekatan Arsitektur Modern.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah:

Bagaimana cara merencanakan dan merancang Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai dengan menggunakan Pendekatan Arsitektur Modern?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan suatu bangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai dirancang sebagai bangunan perkantoran yang modern dan efisien. Desainnya memperhatikan aspek-aspek penting untuk menunjang aktivitas perkantoran secara optimal.

1.4.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sebuah gedung yang layak untuk pegawai Dinas PUPR maupun pengunjung agar mendapatkan kenyamanan dalam beraktifitas. Perencanaan terhadap sistem struktur dan konstruksi pada bangunan. Meningkatkan operasional bangunan dari segi pengelolaan tapak, efesiensi penggunaan energi, sirkulasi dalam dan luar bangunan, dan penggunaan material denggan menggunakan pendekatan Arsitektur Modern.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

1.5.1 Ruang lingkup

a. Ruang lingkup substansi

Kajian studi teori ini mencakup aspek fungsi, struktur, estetika, dan ekologi dalam perencanaan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Modern.

b. Ruang lingkup Spasial

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manggarai direncanakan dan dirancang untuk dibangun di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

c. Anggapan Dasar

Perencanaan ini dibuat dikarenakan kantor PUPR yang lama tidak lagi layak digunakan dikarenakan lokasi kantor lama yang sangat sempit untuk menampung segala aktifitas perkantoran dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai.

1.5.2 Batasan

Studi ini berfokus pada desain fisik bangunan, pola sirkulasi, tata masa bangunan, struktur, konstruksi, dan utilitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai yang optimal dalam menunjang aktivitas perkantoran, dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Modern.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode

a. pengumpulan data

Berdasarkan jenis data dan teknik pengumpulan data, dapat dilakukan metode sebagai berikut:

❖ Data Primer

- Studi lapangan dilaksanakan secara langsung dengan melakukan survey langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya secara nyata/pasti dan terperinci.

Data-data yang diambil antara lain, yaitu:

Luasan lokasi

Keadaan Topografi

Geologi

Vegetasi

Hidrologi

Keadaan lingkungan non-fisik sekitar lokasi

➤ Wawancara (wawancara tidak terukur)

Wawancara dan konsultasi dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, serta masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan data-data penunjang yang diperlukan dalam perencanaan, tanpa menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur.

➤ Foto dan Sketsa

Pengambilan foto dilakukan untuk mendokumentasikan data-data yang diperlukan. Foto yang diambil meliputi lokasi perencanaan, situasi daerah sekitar, vegetasi, dan hal-hal lain yang relevan dengan perencanaan.

❖ Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak langsung berkaitan dengan objek perancangan, namun sangat mendukung proses perancangan. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain, berupa catatan atau laporan yang telah terdokumentasikan dalam arsip. Data sekunder diambil melalui

➤ Referensi buku

➤ Jurnal

➤ Artikel dalam media internet, dll

1.6.2 Metode Analisa

Dari data data yang telah terkumpul kemudian di analisa untuk memperoleh suatu penyelesaian. Adapun analisa tersebut terdiri atas analisa kualitatif dan analisa kuantitatif:

a. Kualitatif

Analisis hubungan sebab akibat, identifikasi masalah, dan penentuan konsep relevan dilakukan dalam konteks perencanaan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Kuantitatif

Analisis ini melibatkan perhitungan-perhitungan tertentu berdasarkan standar dan ruang gerak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bangunan perkantoran. Perhitungan ini meliputi besaran ruang, bentuk, dan ukuran fasilitas yang ada dalam bangunan.

c. Analisis Pendekatan

Analisis ini menitikberatkan pada pendekatan Arsitektur Modern dalam perencanaan dan perancangan Kantor PUPR Kabupaten Manggarai. Kajian konseptual ini mendalami dan menerapkan prinsip-prinsip Arsitektur Modern, khususnya dalam hal pengubahan massa bentuk menjadi lebih modern.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

pada BAB I ini akan menjelaskan tentang : Latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode dan teknik, ruang lingkup dan batasan, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang: Pengertian judul, Pengertian Kantor Dinas PUPR, Arsitektur Modern dan obyek studi banding

BAB III TINJAUAN LOKASI

Pada BAB III hal-hal yang akan di jelaskan adalah: Pembahasan tentang gambaran umum lokasi perencanaan.

BAB IV ANALISIS

Pembahasan pada BAB IV ini adalah: Proses analisa data yang di dapat dari hasil penelitian (hasil survei dan referensi yang bersumber dari buku dan internet)

BAB V KONSEP PERANCANGAN

Pembahasan pada BAB V ini adalah: menjelaskan mengenai konsep-konsep perencanaan dari hasil Analisa sehingga menghasilkan sebuah desain sesuai pendekatan Arsitektur Modern.